

PELATIHAN TATA KELOLA BLUD UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN SMKN DI BENGKULU

Yusmaniarti¹, Hernadianto², Sri Ekowati³

¹²³Universitas muhammadiyah Bengkulu

yusmaniarti@umb.ac.id, hernadianto@umb.ac.id, sriekowati@umb.ac.id

Received: 03-03-2025

Revised: 10-03-2025

Approved: 20-04-2025

ABSTRAK

Pelatihan dan workshop Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diadakan untuk meningkatkan kapasitas SMKN dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan sekolah untuk mewujudkan kemandirian finansial melalui sistem BLUD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sebagai mitra penyelenggara, melibatkan 30 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan pengurus BLUD SMKN se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan berlangsung di Hotel Wilow, Kota Bengkulu, selama tiga hari. Hasil dari kegiatan ini mencakup peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip dan mekanisme BLUD, keterampilan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), serta laporan keuangan berbasis akrual. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan kualitas pengelolaan keuangan sekolah, terciptanya kemandirian dalam pendanaan, serta mendorong efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan, yang pada gilirannya berkontribusi pada kualitas pendidikan yang lebih baik.

Kata Kunci : Tata Kelola BLUD, SMKN, Pelatihan, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Pengelolaan Keuangan, Kemandirian Sekolah, Transparansi, Akuntabilitas,

PENDAHULUAN

Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kualitas layanan pendidikan. Dengan status BLUD, sekolah diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan unit usaha secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan, masih banyak SMKN yang menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan BLUD secara profesional dan sesuai regulasi.

Sebagian besar kepala sekolah, bendahara, dan pengurus BLUD di lingkungan SMKN belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip tata kelola BLUD, termasuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Ketidaksiapan dalam aspek teknis dan administratif ini berisiko menghambat tujuan utama dari implementasi BLUD, yaitu menciptakan sekolah yang mandiri, inovatif, dan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas (Alwahdy, F., & Setyaningrum, D. 2023).

Melihat urgensi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan workshop tata kelola BLUD bagi para kepala sekolah, bendahara, dan pengurus BLUD SMKN se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam mengelola BLUD secara efektif dan akuntabel. Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten serta metode pelatihan yang aplikatif, diharapkan para peserta dapat

mengimplementasikan hasil pelatihan di satuan pendidikan masing-masing sehingga mendukung terwujudnya SMKN yang mandiri dan unggul (Hakim, L., & Masdjojo, G. N. 2024).

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan vokasi, pemerintah melalui kebijakan otonomi pengelolaan keuangan memberikan peluang kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status ini, sekolah diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk pendapatan dan belanja, yang memungkinkan sekolah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan operasional dan pengembangan layanan pendidikan yang berbasis pasar kerja (Komalasari, S. P., *et al.* 2024).

Namun, perubahan pola pengelolaan dari sistem konvensional ke sistem BLUD bukanlah sesuatu yang sederhana. Banyak SMKN yang mengalami kesulitan dalam tahap transisi ini karena keterbatasan pemahaman dan kapasitas manajerial dari pihak-pihak yang terlibat, terutama kepala sekolah, bendahara, dan pengurus BLUD. Tata kelola keuangan BLUD menuntut kompetensi teknis dalam menyusun dokumen perencanaan keuangan seperti Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), mengelola kas sesuai asas fleksibilitas, hingga menyusun laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pelatihan tata kelola BLUD menjadi sangat penting dan mendesak karena tanpa pemahaman yang memadai, sekolah rawan melakukan kesalahan administratif dan teknis yang berpotensi berdampak pada akuntabilitas dan legalitas penggunaan dana. Selain itu, pemanfaatan potensi unit produksi dan jasa yang dimiliki oleh SMKN sebagai sumber pendapatan BLUD belum dioptimalkan karena kurangnya pemahaman dalam perencanaan bisnis dan pengelolaan keuangan secara profesional (Rosidi, M., *et al.* 2024).

Urgensi pelatihan ini juga terletak pada kebutuhan untuk menciptakan budaya tata kelola yang transparan dan berorientasi pada hasil. Pelatihan ini bukan hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun pemahaman filosofis dan regulatif tentang pentingnya BLUD dalam mewujudkan SMKN sebagai lembaga pendidikan yang mandiri, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan industri.

Dengan latar belakang tersebut, pelatihan dan workshop Tata Kelola BLUD yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi manajemen SMKN menuju tata kelola yang lebih baik, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu peserta, tetapi juga mempercepat implementasi BLUD secara menyeluruh di lingkungan SMKN se-Provinsi Bengkulu.

Masih banyaknya permasalahan yang ditemukan seperti belum optimalnya pemahaman tentang tata kelola BLUD di SMKN. Banyak SMK Negeri di Provinsi Bengkulu yang telah berstatus atau sedang menuju status BLUD belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, aturan, dan praktik pengelolaan keuangan BLUD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keterbatasan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Keuangan BLUD Kepala sekolah, bendahara, dan pengurus BLUD di lingkungan SMKN belum seluruhnya memiliki kompetensi teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan

BLUD, termasuk dalam penyusunan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) dan laporan keuangan berbasis akrual.

Kurangnya Pendampingan Teknis dan Praktis Sekolah-sekolah yang baru menerapkan BLUD seringkali belum mendapatkan bimbingan teknis yang memadai dari pihak terkait, sehingga mengalami kebingungan dalam implementasi kebijakan dan prosedur tata kelola BLUD.

Perlunya Penguatan Kemandirian Sekolah. Salah satu tujuan utama dari penerapan BLUD adalah mendorong kemandirian sekolah dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan. Namun, masih banyak sekolah yang belum mampu menjalankan fungsi BLUD secara optimal untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas.

Kurangnya forum kolaboratif dan berbagi praktik baik. Diperlukan wadah untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi antar SMKN dalam pengelolaan BLUD. Selama ini, belum banyak forum yang mempertemukan para pelaksana BLUD sekolah dalam satu kegiatan pelatihan atau workshop secara terstruktur.

Solusi yang diharapkan drai permasalahan ini dapat melauai bebrpa kegiatan seperti peningkatan kapasitas sdm melalui pelatihan berkelanjutan menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala dan terstruktur untuk kepala sekolah, bendahara, serta pengurus BLUD SMKN guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun RBA, pengelolaan keuangan fleksibel, serta pelaporan keuangan berbasis akrual.

Penyusunan modul dan panduan praktis tata kelola BLUD Sekolah Menyediakan buku panduan atau modul praktis yang disesuaikan dengan konteks sekolah, agar memudahkan pemahaman dan implementasi teknis tata kelola BLUD, termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa, penyusunan laporan, dan audit internal.

Penerapan sistem pendampingan teknis oleh tim ahli. melibatkan tim pembina dan pendamping BLUD secara aktif untuk melakukan asistensi langsung ke sekolah-sekolah, memberikan solusi atas permasalahan teknis, serta memastikan pelaksanaan BLUD berjalan sesuai regulasi.

Peningkatan Kolaborasi antar Sekolah dan Forum Komunikasi BLUD SMK Membentuk forum komunikasi atau komunitas praktik (community of practice) antar SMKN pelaksana BLUD, agar tercipta ruang berbagi pengalaman, strategi, dan inovasi dalam pengelolaan keuangan BLUD.

Integrasi Tata Kelola BLUD dalam Sistem Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan Mengintegrasikan aspek tata kelola BLUD ke dalam mekanisme pengawasan rutin oleh Dinas Pendidikan agar terjadi pembinaan dan evaluasi berkala yang mendorong perbaikan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan BLUD mendorong penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan (misalnya SIM-BLUD atau sejenisnya) untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah berbasis BLUD. Berikut pada tabel 1 dapat diringkas solusi permasalahan

Tabel: Solusi Permasalahan Tata Kelola BLUD SMKN se-Provinsi Bengkulu

Permasalahan	Solusi	Strategi Implementasi
Kurangnya pemahaman tentang prinsip dan mekanisme tata kelola BLUD	Menyelenggarakan pelatihan dan workshop berkala	Pelatihan teknis oleh narasumber ahli; disesuaikan dengan kebutuhan dan level sekolah
Keterbatasan SDM dalam	Penyusunan modul/panduan	Distribusi panduan ke seluruh

Permasalahan	Solusi	Strategi Implementasi
penyusunan RBA dan laporan keuangan berbasis akrual	praktis tata kelola BLUD sekolah	sekolah; pelatihan berbasis modul
Minimnya pendampingan teknis di lapangan	Penerapan sistem pendampingan oleh tim pembina dan pendamping BLUD	Penugasan tim pendamping ke sekolah; monitoring berkala
Belum adanya forum berbagi pengalaman dan best practices antar SMK	Pembentukan forum komunikasi BLUD antar SMKN	Rapat koordinasi, diskusi daring/luring, dan pertemuan rutin antarsekolah
Lemahnya pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan BLUD	Integrasi aspek BLUD ke dalam sistem pengawasan dan evaluasi pendidikan	Dinas Pendidikan memasukkan indikator BLUD dalam supervisi dan evaluasi sekolah
Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam tata kelola keuangan sekolah	Mendorong penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan (misalnya SIM-BLUD)	Pelatihan penggunaan aplikasi; pendampingan implementasi teknologi

METODE KEGIATAN

Metode ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan langsung konsep tata kelola BLUD di sekolah masing-masing. Pelatihan dan workshop Tata Kelola BLUD SMKN se-Provinsi Bengkulu dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan aplikatif, menggabungkan metode penyampaian teori dan praktik. Adapun metode kegiatan yang digunakan ditunjukkan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Metode kegiatan

Secara rinci tahapan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Presentasi Materi**

Penyampaian materi inti oleh narasumber dilakukan secara langsung melalui ceramah dan presentasi, untuk memberikan landasan teori serta pemahaman regulatif terkait tata kelola BLUD di lingkungan satuan pendidikan.

2. **Diskusi Interaktif**

Sesi tanya jawab dan diskusi dilakukan setelah penyampaian materi untuk memberikan ruang kepada peserta menggali lebih dalam, menyampaikan kendala di lapangan, serta mendiskusikan solusi bersama narasumber dan sesama peserta.

3. Studi Kasus dan Simulasi

Peserta diberikan contoh nyata kasus pengelolaan BLUD di sekolah dan diajak untuk melakukan simulasi penyusunan dokumen penting seperti Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), pelaksanaan anggaran, serta pelaporan keuangan berbasis akrual.

4. Pendampingan Teknis (Coaching Clinic)

Kegiatan dilengkapi dengan sesi pendampingan langsung oleh tim pembina dan pendamping BLUD, di mana peserta mendapatkan bimbingan teknis secara lebih mendalam dan personal terhadap masalah spesifik yang dihadapi masing-masing sekolah.

5. Evaluasi Kegiatan

Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta serta efektivitas pelatihan, baik melalui diskusi terbuka maupun pengisian kuesioner sebagai bahan perbaikan kegiatan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan dan workshop Tata Kelola BLUD yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan selama tiga hari dengan pendekatan yang komprehensif. Metode kegiatan yang digunakan terbukti mampu menjawab kebutuhan peserta secara bertahap, mulai dari pemahaman konseptual hingga keterampilan teknis yang aplikatif.

Kegiatan pelatihan dan workshop Tata Kelola BLUD yang dilaksanakan selama tiga hari telah menghasilkan sejumlah capaian yang signifikan, baik dari sisi peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis, maupun semangat kolaboratif antar peserta. Seluruh peserta yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan pengurus BLUD SMKN se-Provinsi Bengkulu mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif terlibat dalam setiap sesi.

Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta terhadap konsep dan regulasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sektor pendidikan, khususnya pada level sekolah menengah kejuruan. Peserta memahami dengan lebih jelas tentang fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD, prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta tanggung jawab yang melekat pada pengelola keuangan sekolah yang berstatus BLUD. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta masih memiliki persepsi yang terbatas dan kurang tepat mengenai praktik BLUD; namun setelah pelatihan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman mendasar tersebut (Iqbal Rasyid, 2023).

Selain pemahaman konseptual, peserta juga memperoleh keterampilan praktis, terutama dalam hal penyusunan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), serta pelaporan keuangan berbasis akrual. Melalui kegiatan simulasi dan studi kasus, peserta tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga menyusun draft RBA berdasarkan situasi sekolah mereka masing-masing. Ini menunjukkan bahwa peserta mulai mampu menerapkan materi yang diberikan secara aplikatif.

Pada sesi ceramah dan presentasi materi, peserta mendapatkan penjelasan yang mendalam mengenai kebijakan dan dasar hukum pelaksanaan BLUD di satuan pendidikan. Materi yang disampaikan oleh narasumber memberikan pemahaman yang lebih utuh

tentang tujuan BLUD, ruang lingkup pengelolaan keuangan yang fleksibel, serta tanggung jawab akuntabilitas yang melekat pada pengurus BLUD sekolah. Sesi ini berhasil membangun pondasi pemikiran bagi peserta, khususnya kepala sekolah dan bendahara, tentang pentingnya transformasi manajemen keuangan di sekolah agar lebih mandiri dan efisien.



Gambar 3. Pemaparan materi, diskusi dan simulasi

Pada gambar 2 dan 3 menunjukkan kegiatan sesi diskusi interaktif yang dilaksanakan setelah penyampaian materi memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan praktik baik yang sudah dijalankan di sekolah masing-masing. Beberapa peserta mengemukakan persoalan teknis, seperti penyusunan RBA yang belum optimal atau kendala dalam pelaporan berbasis akrual. Diskusi ini menjadi sangat penting karena memungkinkan peserta mendapatkan jawaban langsung dari narasumber maupun tim pendamping yang memahami konteks regulasi dan pelaksanaan teknis di lapangan. Dengan demikian, diskusi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi sangat kontekstual dan aplikatif.

Ratnawati, K., & Susilowati, C. (2023) menjelaskan bahwa salah satu metode yang sangat diapresiasi peserta adalah studi kasus dan simulasi. Dalam sesi ini, peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi langsung diajak menyusun draft dokumen seperti Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berdasarkan kasus yang disimulasikan. Metode ini sangat efektif untuk melatih peserta memahami struktur dan logika penyusunan dokumen BLUD. Peserta yang semula belum pernah menyusun RBA dapat mulai memahami bagaimana dokumen tersebut disusun secara sistematis. Meskipun beberapa peserta masih membutuhkan pendampingan dalam aspek teknis, terutama dalam penyesuaian dengan sistem akuntansi berbasis akrual, simulasi ini secara umum berhasil membekali peserta dengan pengalaman nyata yang relevan.

Sesi *coaching clinic* atau pendampingan teknis memberikan nilai tambah yang sangat besar dalam kegiatan ini. Peserta diberi kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan tim pembina dan pendamping mengenai persoalan yang sangat spesifik di sekolah masing-masing. Pendampingan ini membuat kegiatan terasa lebih personal dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Beberapa sekolah yang semula mengalami kebingungan dalam implementasi BLUD mendapatkan arahan teknis yang konkret, termasuk solusi administrasi dan manajerial yang dapat segera diterapkan.

Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan secara keseluruhan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa sangat puas dengan metode pelatihan yang digunakan, materi yang disampaikan, dan pendekatan yang digunakan oleh para narasumber serta tim pendamping. Mereka menyatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diimplementasikan di sekolah. Peserta juga memberikan masukan agar kegiatan ini dilanjutkan dengan pelatihan lanjutan yang lebih mendalam serta pendampingan berkala untuk memastikan keberlanjutan implementasi BLUD secara optimal (Rianti, A. 2020).

Secara keseluruhan, pelatihan ini telah berhasil meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri para kepala sekolah, bendahara, dan pengurus BLUD SMKN se-Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tata kelola keuangan berbasis BLUD. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam mendukung terciptanya sekolah vokasi yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada pelayanan pendidikan yang unggul dan berkelanjutan. Hasil lainnya adalah teridentifikasinya berbagai permasalahan teknis yang selama ini dihadapi oleh sekolah dalam proses penerapan BLUD, yang kemudian berhasil dicarikan solusi melalui sesi pendampingan langsung oleh tim pembina. Beberapa sekolah bahkan telah menetapkan langkah awal untuk menyusun dokumen administrasi dan prosedur operasional standar (SOP) pengelolaan BLUD di sekolah masing-masing.

Kegiatan ini juga menghasilkan forum komunikasi antar SMKN pelaksana BLUD sebagai wadah kolaborasi lanjutan. Forum ini diharapkan menjadi sarana berbagi praktik baik dan penyelesaian masalah secara kolektif antar sekolah yang memiliki tantangan serupa.



Gambar 2

Secara keseluruhan, kegiatan ini telah menciptakan pondasi yang kuat bagi SMKN se-Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan BLUD secara lebih baik dan profesional. Keberhasilan kegiatan ini menjadi dorongan positif bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk terus melanjutkan program pembinaan dan pendampingan dalam rangka menciptakan sekolah vokasi yang mandiri, akuntabel, dan mampu bersaing di era modern.

PENUTUP

Dengan dilakukannya tindak lanjut sesuai rekomendasi di atas, diharapkan implementasi BLUD di SMKN se-Provinsi Bengkulu semakin optimal dan dapat mendukung terwujudnya sekolah yang mandiri, profesional, dan lebih akuntabel dalam pengelolaan keuangannya.

Pelatihan dan workshop Tata Kelola BLUD yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu telah berlangsung dengan sukses dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta tentang prinsip-prinsip dasar dan penerapan BLUD di sekolah, serta keterampilan praktis dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan laporan keuangan berbasis akrual. Melalui metode yang beragam, seperti ceramah, diskusi, studi kasus, dan pendampingan langsung, peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga pengalaman praktis yang dapat langsung diterapkan di sekolah masing-masing.

Keberhasilan kegiatan ini juga terlihat dari tingginya antusiasme dan keterlibatan peserta dalam setiap sesi, serta hasil yang dicapai, termasuk penyusunan draft RBA dan identifikasi solusi atas permasalahan yang ada di masing-masing sekolah. Oleh karena itu, kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong implementasi BLUD yang lebih baik dan mendukung tercapainya tujuan sekolah yang mandiri dan profesional dalam pengelolaan keuangan.

Namun, kegiatan ini hanyalah langkah awal. Perlu adanya tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan agar sekolah-sekolah yang telah mengimplementasikan BLUD dapat terus berkembang dan mengatasi tantangan yang ada di lapangan.

SARAN

Berdasarkan hasil pelatihan dan workshop, beberapa rekomendasi untuk kelanjutan pengembangan Tata Kelola BLUD di SMKN se-Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pelatihan Lanjutan

Diperlukan pelatihan lanjutan yang lebih mendalam, khususnya pada aspek teknis seperti pengelolaan keuangan berbasis akrual, audit internal, dan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah proses pelaporan. Pelatihan lanjutan ini dapat berfokus pada pemecahan masalah yang lebih spesifik dan berbasis pengalaman nyata yang dihadapi sekolah.

2. Pendampingan Berkelanjutan

Disarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu terus memberikan pendampingan teknis pasca-pelatihan. Tim pembina dan pendamping harus secara berkala melakukan kunjungan atau asistensi ke sekolah untuk memastikan implementasi BLUD berjalan sesuai regulasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang muncul.

3. Penguatan Forum Komunikasi BLUD Sekolah

Untuk meningkatkan kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar sekolah, sebaiknya dibentuk forum komunikasi atau komunitas praktik bagi sekolah-sekolah yang menerapkan BLUD. Forum ini dapat digunakan untuk saling bertukar pengalaman, strategi, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BLUD.

4. Integrasi Pengawasan dan Evaluasi BLUD dalam Sistem Pendidikan

Agar implementasi BLUD dapat berjalan optimal, perlu adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang terintegrasi dengan mekanisme pengawasan pendidikan yang lebih luas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sebaiknya mengintegrasikan aspek pengelolaan BLUD dalam evaluasi tahunan dan supervisi terhadap SMKN.

5. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan sistem informasi yang mendukung pengelolaan keuangan BLUD diharapkan dapat lebih diperkenalkan. Penggunaan aplikasi yang memungkinkan pencatatan keuangan yang lebih efisien dan transparan harus diprioritaskan agar mempermudah laporan keuangan serta meningkatkan akuntabilitas sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwahdy, F., & Setyaningrum, D. (2023). Evaluasi Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Badan Layanan Umum Daerah Pendidikan (Studi Kasus: SMK Negeri Mandiri 'X' Jakarta). *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(3), 648-662.
- Hakim, L., & Masdjojo, G. N. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Manajemen Keuangan Sekolah. *Journal Of Science And Social*
- Iqbal Rasyid, M. U. H. A. M. M. A. D. (2023). *Analisis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk-Blud) Sebagai Pengelolaan Keuangan Di Blud Uptd Spam Kota Tanjungpinang* (Doctoral Dissertation, Stie Pembangunan Tanjungpinang).
- Komalasari, S. P., Kartika, R., Silmi, S., & Oktavia, F. (2024). Strategi Penguatan Kemandirian Blud-Smk Melalui Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Mengenai Tarif Produk Smkn Di Sumatera Barat. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, 7(1), 98-109.
- Pristi, N. A., Sjafri, A. V., & Suprayitno, G. (2023). Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah Melalui Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 18(1), 73-83.
- Ratnawati, K., & Susilowati, C. (2023). Pelatihan Persiapan Penerapan Blud (Badan Layanan Umum Daerah) Pada Smk Di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(5), 337-342.
- Rianti, A. (2020). *model pengawasan keuangan blud dalam meningkatkan akuntabilitas di smk negeri i jenangan ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). *RESEARCH*, 7(4), 1716-1723.
- Rosydiana, A. (2023). Penerapan ekonomi sirkular pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK pusat keunggulan. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 10(1), 1-10.
- Rosidi, M., Fahrudin, F., Hakim, M., Sudirman, S., & Mustari, M. (2024). Implementation of Regional Public Service Agency Management at State Vocational High School 5 Mataram, Indonesia. *Path of Science*, 10(8), 7026-7033.